

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- A'an Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Adrian Sutedi (b), *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta, Penerbit Cipta Jaya, 2006.
- Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 50.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, C.V. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal 97.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas, 1961.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal.24.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal. 174.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta CV, 2016, hal.11.
- Mexasai Indra, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah*, Yogyakarta, GENTA Publishing, 2015, hal. 82.
- Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta, 2006, hal.2.
- R.M, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbitan Yogyakarta Library, 1988.
- Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hal.6-7.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2008, hal.10, 24.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 1.
- Zainudin Ali, *Op. Cit.*, 2009, hal. 106.

### B. Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang *Hak Ulayat dan Pemanfaatannya*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang *BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang *Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

### C. Jurnal

Arina Novizas Shebubakar, *Marie Remfan Raniah*, 2019, "Hukum Tanah Adat/Ulayat", Vol IV, No. 1, 2019.

Sari Yunita, 2010. *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Skripsi*, hal. 17. Tulisan ini dikutip Herman Soesangobeng, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pertahanan 2002 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, 2002, hal. 1. Tulisan ini ada di Buku Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia Yogyakarta, 2006, hal.3.

Tesya Veronika, Atik Winanti, 2021, *Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara*, Vol 11, No. 2, 2021.

### D. Internet

<http://www.kbbi.web.id>.